KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Krisis energi fosil, saatnya percepat pengembangan EBT
Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Krisis Energi Fosil

Saatnya Percepat Pengembangan EBT



FOTO: DPR.GO.ID

Cheroline Chrisye

ANGGOTA Komisi XII DPR Cheroline Chrisye Makalew mendorong Pemerintah mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya listrik. Langkah ini dinilai strategis sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil di tengah ketidakpastian global.

Cheroline mengingatkan, Indonesia harus menjaga ketahanan energi nasional, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga. Langkah yang dilakukan yakni memperkuat cadangan energi nasional, meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan. "Juga mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan agar ketahanan energi kita semakin kokoh ke depan," jelasnya, Minggu (5/4/2026).

Selain itu, dia meminta Pemerintah memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah tekanan sektor energi. Tanpa pengawasan yang ketat, penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi akan terus terjadi dan merugikan masyarakat.

"Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kenyataan di lapangan sering sekali disalahgunakan," tandas politikus Nasdem ini.

Sementara, anggota Komisi XII DPR Syafruddin meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi. Kriteria ini berbasis pada data terpadu nasional dengan integrasi lintas sektor secara tegas dan transparan.

Menurutnya, saat ini dibutuhkan sinkronisasi data kendaraan dan profil sosial ekonomi pengguna. Hal ini dilakukan agar subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak secara sistemik dan bukan justru dinikmati kelompok yang mampu. "Kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa dasar data yang kuat," tegas Syafruddin, Minggu (5/4/2026).

Dengan itu, Syafruddin mendorong Pemerintah menggunakan basis data terpadu nasional yang mengintegrasikan berbagai sektor. Sehingga, penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. "Kami berharap kebijakan penghematan energi ini tidak malah memicu gejolak di publik karena ketidakjelasan penerima BBM subsidi dan penugasan," ucap politikus PKB ini.

Menurutnya, langkah pengetatan ini sangat penting untuk membantu negara dalam mengantisipasi dampak kelangkaan energi global. Terlebih, konflik di Timur Tengah (Timteng) memberikan tekanan besar pada pasokan energi dunia. Sementara, posisi Indonesia saat ini adalah negara pengimpor BBM yang sangat bergantung pada pasokan luar negeri. "Ketergantungan pada impor membuat posisi kita sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global," kata dia. ■ TIF